

ANALISIS MANFAAT PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM OTONOMI DAERAH PADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KECAMATAN BABELAN

Donna Sampaleng

STT IKAT

donnasampaleng@sttikat.ac.id

Baharuddin

Universitas Islam 45 Bekasi

baharuddin@unismabekasi.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan pendidikan Islam dalam otonomi daerah pada pendidikan dan tenaga kependidikan di kecamatan Babelan. Penelitian ini diawali dengan kajian teori dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil wawancara dengan pengolahan hasil wawancara yang dipresentasikan dari google form. Hasil yang didapatkan adalah secara teori belum semua memahami apa itu sentralisasi dan desentralisasi. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, didapatkan bahwa hasil penelitian ini bahwa dalam praktiknya tentu semua bertahap untuk mengoptimalkan pendidikan desentralisasi otonomi daerah. Manfaat pendidikan otonomi daerah meliputi kemandirian daerah, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dan lebih peka terhadap kebutuhan lokal. Adapun dalam analisisnya tentu belum semua daerah merasakan dampak secara keseluruhan dari pendidikan otonomi daerah. Walaupun begitu semua sepakat bahwa pendidikan otonomi daerah bisa menjadikan pendidikan lebih berkualitas.

Kata Kunci : Perencanaan Pendidikan, Implikasi Positif Pendidikan, Otonomi Daerah.

Abstract

The purpose of this study was to analyze Islamic education planning in regional autonomy for education and educational staff in the Babelan sub-district. This research begins with a theoretical study using qualitative research to obtain interview results by processing the interview results presented from the Google form. The results obtained are that in theory not all understand what centralization and decentralization are. Based on the results of the analysis of research data, it was found that the results of this study indicated that in practice, of course, all stages were taken to optimize regional autonomy decentralization education. The benefits of regional autonomy education include regional independence, maximum utilization of local potential, and being more sensitive to local needs. As for the analysis, of course not all regions feel the overall impact of regional autonomy education. Even so, all agree that regional autonomy education can make education more quality.

Keywords: Educational Planning, Positive Implications of Education, Regional Autonomy.

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹ Proses yang rasional dan sistematis tersebut menjadi kan perencanaan sebagai unsur yang strategis

¹ Albab, Ulil. "Perencanaan Pendidikan dalam Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam." *Jurnal Pancar (Pendidik Anak Cerdas dan Pintar)* 5.1 (2021): 119-126.

dalam bidang pendidikan, karena menjadi faktor kunci keberadaan suatu lembaga pendidikan, baik pada tingkat makro maupun mikro, sehingga berperan terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan.² Sehingga esensi dari perencanaan yaitu memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.³

Sejak reformasi, program desentralisasi diberlakukan hampir di semua bidang, kecuali pada lima hal, yaitu keuangan, agama, hukum, dan pertahanan. Sebelum akhirnya ada penambahan bidang, yaitu sektor pendidikan.⁴ Hal ini berarti sistem pendidikan nasional yang dulunya bersifat sentralistik kini bersifat desentralistik. Sistem pendidikan yang sentralistik keberagaman daerah, keberagaman sekolah, dan keberagaman peserta didik, bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Sedangkan sistem pendidikan yang desentralisasi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, di mana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya termasuk dalam bidang pendidikan. Pemberlakuan otonomi daerah tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan.^{5,6}

Rekonstruksi pendidikan sangat diperlukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan kebijakan pendidikan.⁷ Rekonstruksi pendidikan diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat maupun daerah dengan lembaga-lembaga pendidikan yang bersangkutan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut demi tercapainya tujuan pendidikan nasional, dan dalam makalah ini pemakalah akan membahas tentang efektivitas perencanaan pendidikan dalam desentralisasi pendidikan.^{8,9}

² Alwi, Zahra, Ernalida Ernalida, dan Yenni Lidyawati. "Kepraktisan Bahan Ajar Perencanaan Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter dan Saintifik." *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 16.1 (2020): 10-21.

³ Yusuf, Arif Maulana, dan Budi Permana. "Perencanaan Arsitektur Sistem Terintegrasi Dengan Menggunakan Togaf Adm (Studi Kasus: Yayasan Pendidikan Rosma)." *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi* 14.1 (2019): 21-29.

⁴ Primayana, Kadek Hengki. "Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0." *Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya*. Vol. 1. No. 3. 2020.

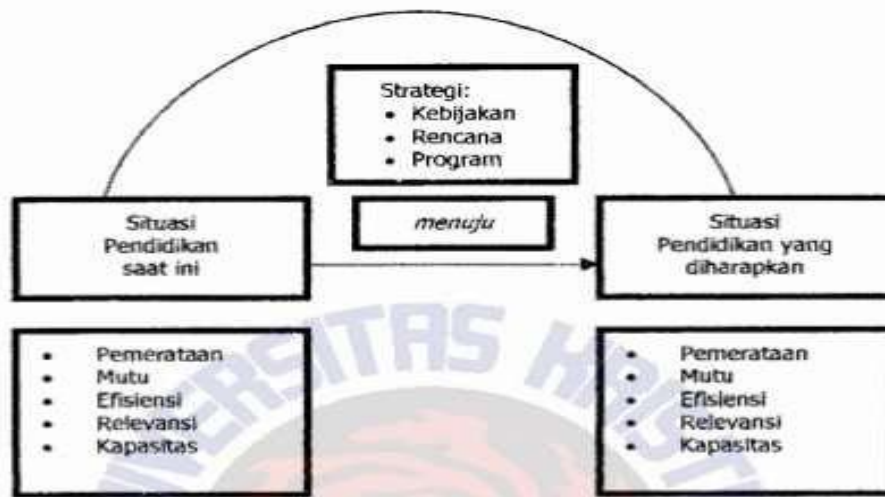
⁵ Idris, Idris. "Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan." *Scolae: Journal of Pedagogy* 3.2 (2020).

⁶ Aziz, Asep Abdul, dkk. "Model Analisis Kebijakan Pendidikan." *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 4.2 (2020): 192-201.

⁷ Djuanda, Isep. "Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Karakter Model CIPP (Context, Input, Process dan Output)." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 3.01 (2020): 37-53.

⁸ Nirmayani, L. Heny. "Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar Melalui Model Pengajaran Bermain Peran." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 1.2 (2020): 207-215.

Era otonomi daerah telah merubah paradigma dalam pendekatan perencanaan pendidikan di daerah dari pendekatan diskrit sektoral menjadi integrated dengan sektor lainnya di daerah.^{10,11} Sebelum otonomi, sistem alokasi anggaran pendidikan di daerah diperoleh dari APBN pusat secara sektoral pada sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, serta kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, namun setelah otonomi diperoleh dari APBD yang berasal dari berbagai sumber sebagai bagian dari dana daerah untuk seluruh sektor yang menjadi tanggung jawab daerah. Sumber-sumber itu meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana dekonsentrasi, dana perbantuan, pendapatan asli daerah, dan bantuan masyarakat.¹² Dengan demikian dalam model perencanaan pendidikan telah terjadi perubahan sumber anggaran yang semula bersifat tunggal-hierarkhi-sektoral sekarang menjadi jamak-fungsional dan regional, tetapi dalam persaingan antar sektor.¹³



Gambar 1. Perencanaan Pendidikan Kabupaten/Kota

Pada hakikatnya sebuah perencanaan dibuat dalam rangka mengubah situasi pendidikan saat ini (dalam kenyataan) menuju situasi pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Untuk

⁹ Darwisyah, Darwisyah, Kemas Imron Rosadi, dan Hapzi Ali. "Berfikir Kesisteman dalam Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan Islam." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2.1 (2020): 225-237.

¹⁰ Nuryasin, Muhamad, dan Margono Mitrohardjono. "Strategi Perencanaan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 4.2 (2019): 77-84.

¹¹ Oktapiani, Marliza. "Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Indonesia." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 2.1 (2019): 71-102.

¹² Ramdhan, Tri Wahyudi. "Model Pengembangan Kurikulum Multikultural." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5.2 (2019).

¹³ Soekmono, Roostrianawahti, dan Dhita Paranita Ningtyas. "Model Pembelajaran Pendidikan Multikultural melalui Pendekatan Proyek Kolaboratif." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4.2 (2020): 1029-1040.

itu ada 3 strategi yaitu kebijakan, perencanaan, dan program pendidikan, yaitu:¹⁴

- (1) Kebijakan Pendidikan; kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada para manajer untuk bergerak. kebijakan juga berarti suatu keputusan yang luas untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen.
- (2) Perencanaan Pendidikan; Perencanaan dibuat dengan mengacu pada kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. perencanaan pendidikan adalah proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan/tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. dalam rangka membuat perencanaan pendidikan tersebut, melakukan proses identifikasi, mengumpulkan data-data internal dan eksternal untuk memperoleh informasi terkini dan bermanfaat bagi penyiapan dan pelaksanaan rencana jangka panjang dan pendek dalam rangka untuk merealisasikan atau mencapai tujuan pendidikan kabupaten/kota. Perencanaan penting untuk memberi arahan dan bimbingan kepada pelaku pendidikan.
- (3) Program Pendidikan; kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan strategi, program dan peta pelaksanaannya.

Beberapa dampak positif pemberlakuan otonomi daerah bidang pendidikan antara lain adalah kemandirian daerah, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dan Lebih peka terhadap kebutuhan lokal.¹⁵

1. Kemandirian Daerah

Pemberian otoritas kepada daerah untuk mengelola urusan pendidikan, maka pemerintah daerah dituntut untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan mereka secara mandiri, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Kemandirian ini diwujudkan antara lain dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga diberi keleluasaan untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya pendidikan. Sekolah dan guru yang semula menjadi bagian dari pengelolaan Departemen Pendidikan Nasional diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Hal ini memberikan kesempatan sekaligus juga tantangan kepada pemerintah daerah untuk benar-benar mampu mengelola penyelenggaraan pendidikan.

2. Memaksimalkan Potensi

¹⁴ Suratno, Joko, Diah Prawitha Sari, dan Asmar Bani. "Kurikulum dan Model-model Pengembangannya." *Jurnal Pendidikan Guru Matematika* 2.1 (2022).

¹⁵ Sahara, Zaini, Muhammad Fuad Zaini, dan Risma Handayani. "Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Mts Al-Wasliyah Stabat." *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 1.2 (2019): 1-8.

Setiap daerah memiliki potensi masing-masing dalam hal pendidikan. Berbagai potensi tersebut tidak diperhatikan ketika pengelolaan pendidikan dilangsungkan secara sentralistik, karena terjadi penyeragaman dalam berbagai kebijakan, pengelolaan dan kegiatan pendidikan. Pemberian otoritas pendidikan yang lebih besar kepada daerah memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi pendidikan yang dimiliki. Potensi dimaksud meliputi potensi lembaga, potensi sumberdaya manusia dan potensi kearifan lokal.

3. Kebutuhan Lokal

Pemberian otoritas yang besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan telah mendekatkan pengambil kebijakan pendidikan dengan pelaksana pendidikan, yaitu sekolah dan para guru, dan konsumen pendidikan, yaitu masyarakat. Meskipun pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dan karenanya materi pendidikan pun banyak memiliki kesamaan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah memiliki beberapa perbedaan dalam hal kebutuhan pendidikan. Kekhasan daerah akan kebutuhan tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi geografis, pengaruh praktek pendidikan di masa lalu, input pendidikan yang tidak merata dan warisan budaya setempat. Kemampuan otoritas pendidikan daerah dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan daerahnya pada gilirannya akan mampu meningkatkan akses, partisipasi dan kualitas pendidikan.

Pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu proses pemberdayaan yaitu membebaskan individu dari kungkungan suatu struktur kekuasaan yang terpusat, yang mampu membangun struktur kekuasaan yang hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat yang menyengsarakan rakyat banyak.^{16,17}

METODE PENELITIAN

Metodologi menggunakan penelitian kualitatif dengan metode literatur dan metode wawancara. Metode kuantitatif yaitu pengolahan hasil wawancara yang dipresentasikan dari google form. Penelitian literatur ialah sebuah penelitian yang mengumpulkan sebuah informasi dan data yang dibantu oleh kajian yang pernah ada. Kemudian langkah yang digunakan oleh penulis yakni pertama mencari suatu referensi dengan memakai kata kunci dari judul jurnal tersebut, kemudian penulis menyusun daftar pertanyaan dan menyebarkan kuisioner atau form wawancara secara online dengan google form. Untuk mendukung data literatur ini harus dilaksanakan wawancara kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babelan.

¹⁶ Baharuddin, Baharuddin. "Arah Pendidikan Masa Depan: Perlunya Reorientasi Posisi Pendidik dan Peserta Didik." *Visipena Journal* 9.2 (2019).

¹⁷ Cikka, Hairuddin. "Konsep-Konsep Esensial dari Teori dan Model Perencanaan dalam Pembangunan Pendidikan." *Scolae: Journal of Pedagogy* 3.2 (2020).

Kemudian data didapat dari kajian literatur dan wawancara lalu dibuat dalam bentuk narasi agar mendapatkan sebuah penjelasan umum mengenai manfaat pendidikan pada otonomi daerah. Berikut beberapa pernyataan yang dibuat dari tema-tema pendidikan berupa dampak positif menjadi poin pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 1. Pertanyaan penelitian berdasarkan tema pendidikan

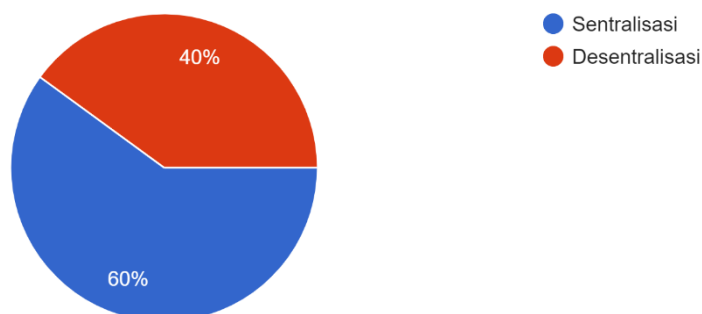
No.	Pertanyaan	Jawaban (Pilihan dan Bebas)	
1.	Sistem pendidikan otonomi daerah	Sentralisasi	Desentralisasi
2.	Sistem perencanaan pembangunan daerah melalui otonomi daerah yang merentang dari pemerintah desa sampai ke tingkat kabupaten/kota.	Sentralisasi	Desentralisasi
3.	Apakah pendidikan otonomi daerah menjadikan pendidikan lebih baik ?	-	-
4.	Pemberian otoritas yang diberikan kepada kepala daerah apakah menjadikan daerah lebih mandiri?	-	-
5.	Potensi lembaga, potensi sumberdaya manusia dan potensi kearifan lokal dapat dimaksimalkan dengan pendidikan otonomi daerah ?	-	-
6.	Sebutkan contoh potensi yang bisa dimaksimalkan dengan pendidikan otonomi daerah ?	-	-
7.	Kemampuan otoritas pendidikan daerah dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan daerahnya pada gilirannya akan mampu meningkatkan akses, partisipasi dan kualitas pendidikan?	-	-
8.	Sebutkan contoh kebutuhan lokal di daerah ?	-	-
9.	Apakah anda sepakat pendidikan otonomi daerah lebih banyak manfaat dari pada negatifnya ?	-	-
10.	Di Indonesia lebih baik menggunakan sistem pendidikan	-	-

Sumber: Wawancara Online. Analisis Manfaat Pendidikan Otonomi Daerah

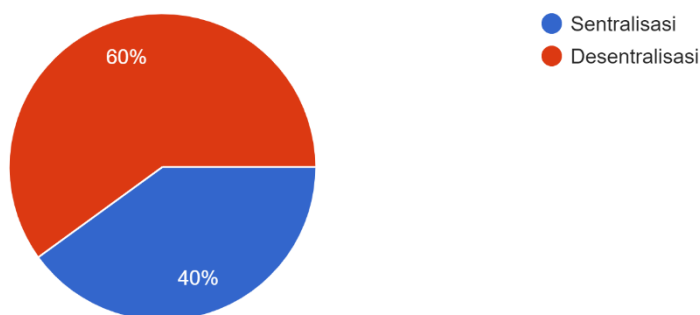
Form wawancara disebar dalam bentuk google form dengan link setelah itu disebar ke grup whatsapp atau chat pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan rata-rata belum memahami perihal perencanaan otonomi daerah secara teori. Penulis menyebar form secara online ke grup yang berisi kepala sekolah dan guru dari tingkat PAUD sampai SMA se-kecamatan babelan dengan respon yang penulis jabarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil wawancara penelitian tentang sistem pendidikan otonomi daerah



Gambar 3. Hasil wawancara penelitian tentang sistem perencanaan pembangunan daerah melalui otonomi daerah yang merentang dari pemerintah desa sampai ke tingkat kabupaten/kota

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi Undang- undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, di mana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi, inovasi, dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya termasuk dalam bidang

pendidikan. Pemberlakuan otonomi daerah tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan.

Menurut Guru Besar pada Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) itu berpendapat, bahwa desentralisasi di Indonesia masih tergolong muda. Kebijakan tersebut baru diterapkan tahun 1999, setelah Orde Baru atau kira-kira baru berumur 20 tahun. Beda halnya dengan Amerika yang sudah berusia 200 tahun dalam menerapkan desentralisasinya. Tommy Firman, mengatakan, kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya masih menjadi kekuatan dalam ekonomi dan pembangunan. Sementara daerah lainnya masih belum sepenuhnya terbangun.

Pada poin 1 dan 2 yang menjadi pertanyaan penulis adalah system di Indonesia menggunakan desentralisasi atau sentralisasi. Hasilnya hanya 60% yang menyatakan desentralisasi. Selaras yang dinyatakan dengan pernyataan di atas. Mungkin usia desentralisasi masih muda. Pemahaman soal desentralisasi juga belum sepenuhnya paham.

Pertanyaan ketiga yang penulis ajukan adalah apakah pendidikan otonomi daerah menjadikan Indonesia lebih baik?. Standar nasional mengamanatkan adanya 8 standar yang harus diterapkan oleh pemerintah guna menghindari kesenjangan kualitas pendidikan. Yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Misal ujian nasional adalah contoh bagian dari salah satu standar nasional. Bagian sebagian daerah ini adalah amanat untuk meningkatkan kualitas memiliki hasil ujian yang berada di atas nilai minimum dan bagi sebagian yang lain ini merupakan sehingga menggunakan berbagai cara yang umumnya tidak halal demi menaikkan nilai siswadiatas rata-rata. Ini menjadi salah satu contoh bahwa desentralisasi belum sepenuhnya berjalan baik.

Pertanyaan keempat yaitu 'Pemberian otoritas yang diberikan kepada kepala daerah apakah menjadikan daerah lebih mandiri'. Arifin mengidentifikasi dua hal persoalan penting dalam hal SDM yang menyebabkan pendidikan di Era pendidikan otonomi daerah tidak berjalan dengan baik yaitu guruyang kurang profesional dan pejabat yang tidak kompeten.¹⁸ Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang memiliki kesiapan yang sama untuk mengelola pendidikan secara baik. Memang tidak semua dinyatakan tidak kompeten karena harapan dari pemerintah adalah agar daerah mandiri. Pemberian otoritas kepada daerah untuk mengelola urusan pendidikan, maka pemerintah daerah dituntut untuk mengelola penyelenggaraan

¹⁸ Arifin, Syamsul, Nurul Abidin, dan Fauzan Al Anshori. "Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 7.1 (2021): 65-78.

pendidikan mereka secara mandiri, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.¹⁹

Selanjutnya perihal pemanfaatan otonomi daerah yaitu Potensi lembaga, potensi sumber daya manusia dan potensi kearifan lokal dapat dimaksimalkan dengan pendidikan otonomi daerah.²⁰ Tentunya dengan penerapan desentralisasi pemanfaatan otonomi akan berjalan lebih mudah dan diharapkan dapat meningkatkan potensi lembaga, sumber daya manusia dan kearifan lokal. Berdasarkan *Undang-Undang No 32 Tahun 2002 mengenai pemanfaatan sumber daya alam, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, maka daya saing yang dimaksud dalam konsideran Undang-Undang tersebut adalah kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik, sumber daya aparatur, serta masyarakat yang membangun kemampuan daerah. Ketika bola daya saing tersebut telah digelindingkan, apakah daerah mampu mengembangkan sektor unggulan dan mampu mewujudkan suasana kompetisi antar daerah untuk kesejahteraan bagi rakyatnya.*

Contoh potensi lembaga yaitu Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu kelebihan pengelolaan lembaga pendidikan yang dimiliki daerah. Hal lain yang sering menjadi keunggulan sebuah lembaga pendidikan adalah budaya sekolah yang diciptakan. Budaya sekolah merupakan faktor penting bagi pendidikan karakter siswa. Potensi sumberdaya manusia meliputi kepemimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu tantangan pengelolaan pendidikan di Era Otonomi daerah. kearifan lokal (*local wisdom*) dengan berbagai bentuk dan variasinya.^{21,22}

Otonomi daerah di bidang pendidikan memberikan kesempatan bagi para pemangku otoritas untuk memanfaatkan berbagai kearifan lokal tersebut, melestarikannya, bahkan menggali berbagai potensi kearifan lokal yang belum dimanfaatkan.²³ Salah satu bentuk kearifan lokal adalah hubungan antar pemeluk agama di sebuah daerah yang multi-iman. Praktek kerukunan yang sudah berlangsung bertahun-tahun di masyarakat hendaknya menjadi bagian dari pendidikan di sekolah, sehingga nilai-nilai kebersamaan tidak mudah luntur oleh pengaruh dari luar yang mungkin menguatkan keberagamaan seseorang tetapi melunturkan nilai-nilai

¹⁹ Yusup, Wirastiani Binti, Bambang Ismanto, dan Wasitohadi Wasitohadi. "Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama." *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 6.1 (2019): 44-53.

²⁰ Wahyudin, Undang Ruslan. *Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional)*. Deepublish, 2020.

²¹ Fadhi, Muhammad. "Implementasi Manajemen Strategik dalam Lembaga Pendidikan." *Continuous Education: Journal of Science and Research* 1.1 (2020): 11-23.

²² Fauziah, R. S., Novi Maryani, dan Ratna Wahyu Wulandari. "Pelaksanaan Model Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar." *Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6.2 (2019): 139-154.

²³ Ismail, Feiby, dan Mardan Umar. "Implementasi Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Islam; Studi Multisitus di MAN Model 1 Manado, MAN 1 Kotamobagu dan MAN 1 Kota Bitung." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14.1 (2020): 78-95.

kebersamaan.²⁴

Kemampuan otoritas pendidikan daerah dalam memperhatikan kebutuhan pendidikan daerahnya pada gilirannya akan mampu meningkatkan akses, partisipasi dan kualitas pendidikan. Kemampuan otoritas tentu berhubungan dengan SDM. Jika sumber daya manusia berkompeten sehingga harapan untuk meningkatkan akses dan partisipasi tentu akan berpengaruh dengan kualitas pendidika. Pentingnya seorang pemimpin yang berkualitas untuk bisa menjadi kepala dengan menjalankann amanat pemerintah.

Kebutuhan lokal di daerah tentu tidak sama dan beragam.inilah fungsi desentralisasi agar potensi-potensi di derah bisa muncul. Salah satu dari standar nasional yaitu kurikulum lokal yang sesuai dengan daerah. Jadi muatan lokal tergantung dari masinng-masing daerah. Bisa menilai potensi yang ada di lembaga di setiap daerahnya. Kurikulum muatan lokal (mulok) menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkannya. Hal ini berdasarkan *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. Kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki setiap daerah memungkinkan daerah mengembangkan kurikulum mulok bagi sekolah-sekolah di daerahnya.*

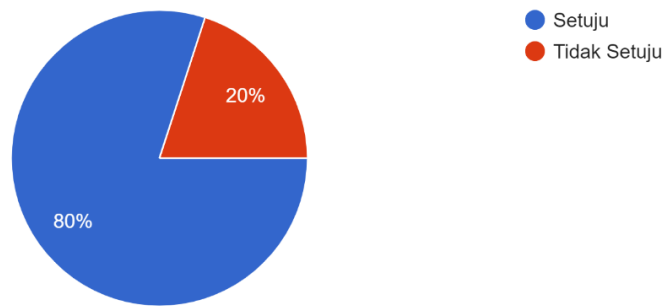
Mulok diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.²⁵

Apakah di Indonesia lebih baik menggunakan sentralisasi atau desentralisasi. Desentralisasi dikatakan lebih baik dibandingkan sentralisasi karena sentralisasi di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang ada di pemerintahan pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan menjadi lama.²⁶ Dan sentralisasi ini sudah tidak digunakan.

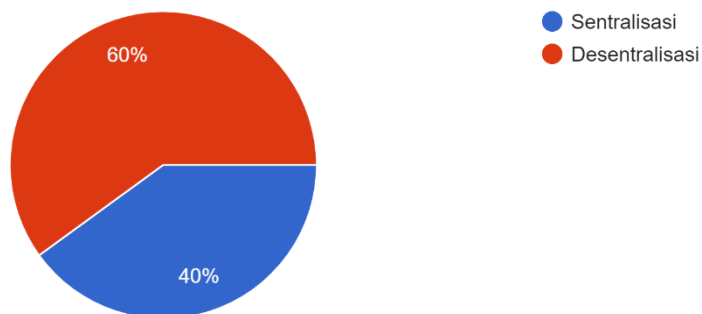
²⁴ Ngadi, Main, Said Subhan Posangi, dan Herson Anwar. "Perencanaan Pendidikan dalam Studi Alquran dan Hadits." *Jurnal Al Himayah* 4.2 (2020): 338-350.

²⁵ Ridwan, Ahmad. "Implementasi Fungsi Planning di Sekolah dalam Kerangka Manajemen Pendidikan Islam." *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 2.2 (2020): 71-83.

²⁶ Ristiana, Lisa. *Model Perencanaan Pendidikan Orang Tua dalam Memilih Lembaga Pendidikan pada Level Madrasah Aliyah (Studi Kasus Desa Tergo Dawe Kudus)*. Diss. IAIN KUDUS, 2020.



Gambar 4. Hasil wawancara tentang manfaat pendidikan otonomi daerah



Gambar 5. Hasil wawancara sistem pendidikan di Indonesia

Di samping berbagai manfaat dari diberlakukannya sistem desentralisasi pendidikan sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri munculnya persoalan-persoalan baru yang perlu mendapat perhatian serius. Berikut adalah beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Yaitu lokalisasi SDM yang kurang menyebar sempurna dan keterlibatannya hanya pada kota besar sehingga daerah-daerah yang jauh dari ibu kota biasanya tertinggal. ketidaksiapan daerah dalam hal pengelolaan pendidikan, terutama kemampuan sumberdaya manusia daerah mengelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel. Sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran.²⁷ Hilangnya narasi besar pendidikan. Melihat fenomena yang hadir di dunia pendidikan dewasa ini, dengan ketidakjelasan narasi bersama dalam pendidikan, maka tidak mengherankan jikapara penyelenggara pendidikan, baik di birokrasi pemerintahan, di lembaga pendidikan negeri dan lembaga pendidikan swasta, lebih memprioritaskan kepentingan kelompok kecil mereka dan kurang memerhatikan kepentingan

²⁷ Subakat, Rahayu. "Perencanaan Pembelajaran Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Program Semai Benih Bangsa." *Jurnal As-Salam* 6.1 (2022): 36-48.

bersama.^{28,29}

Tentunya dari dampak negatif otonomi daerah adalah sebagian kecil. Dengan harapan adanya pendidikan otonomi daerah bisa menjadikan pendidikan lebih berkualitas dalam semua standar. Pun dalam analisis yang penulis dapatkan manfaat yang didapatkan dari pendidikan otonomi daerah tentu lebih besar dibanding negatifnya.

KESIMPULAN

Berbagai persoalan dan pemikiran di atas menunjukkan bahwa pendidikan otonomi daerah sedang dalam proses transisi panjang untuk meningkatkan kualitasnya. Hasil yang didapatkan adalah secara teori belum semua memahami apa itu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam praktiknya tentu semua bertahap untuk mengoptimalkan pendidikan desentralisasi otonomi daerah. Manfaat pendidikan otonomi daerah meliputi kemandirian daerah, pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dan lebih peka terhadap kebutuhan lokal. Adapun dalam analisisnya tentu belum semua daerah merasakan dampak secara keseluruhan dari pendidikan otonomi daerah. Walaupun begitu semua sepakat bahwa pendidikan otonomi daerah bisa menjadikan pendidikan lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Albab, Ulil. "Perencanaan Pendidikan dalam Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam." *Jurnal Pancar (Pendidik Anak Cerdas dan Pintar)* 5.1 (2021): 119-126.
- Alwi, Zahra, Ernalida Ernalida, dan Yenni Lidyawati. "Kepraktisan Bahan Ajar Perencanaan Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter dan Saintifik." *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 16.1 (2020): 10-21.
- Arifin, Syamsul, Nurul Abidin, dan Fauzan Al Anshori. "Kebijakan Merdeka Belajar dan Implikasinya terhadap Pengembangan Desain Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 7.1 (2021): 65-78.
- Aziz, Asep Abdul, dkk. "Model Analisis Kebijakan Pendidikan." *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 4.2 (2020): 192-201.
- Baharuddin, Baharuddin. "Arah Pendidikan Masa Depan: Perlunya Reorientasi Posisi Pendidik dan Peserta Didik." *Visipena Journal* 9.2 (2019).
- Cikka, Hairuddin. "Konsep-Konsep Esensial dari Teori dan Model Perencanaan dalam Pembangunan Pendidikan." *Scolae: Journal of Pedagogy* 3.2 (2020).
- Darwisyah, Darwisyah, Kemas Imron Rosadi, dan Hapzi Ali. "Berpikir Kesisteman dalam Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan Islam." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan*

²⁸ Supriyanto, Agung. "Model Pengembangan Penguatan Pendidikan Karakter dan Literasi Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5.1 (2020): 17-23.

²⁹ Turmuzy, Muhammad, dkk. "Literature Review: Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum 2013 Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product)." *Jurnal Basicedu* 6.4 (2022): 7220-7232.

Ilmu Sosial 2.1 (2020): 225-237.

- Djuanda, Isep. "Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Karakter Model CIPP (Context, Input, Process dan Output)." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 3.01 (2020): 37-53.
- Fadhli, Muhammad. "Implementasi Manajemen Strategik dalam Lembaga Pendidikan." *Continuous Education: Journal of Science and Research* 1.1 (2020): 11-23.
- Fauziah, R. S., Novi Maryani, dan Ratna Wahyu Wulandari. "Pelaksanaan Model Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar." *Didaktika Tauhidi: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6.2 (2019): 139-154.
- Idris, Idris. "Perencanaan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi Pendidikan." *Scolae: Journal of Pedagogy* 3.2 (2020).
- Ismail, Feiby, dan Mardan Umar. "Implementasi Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Islam; Studi Multisitius di MAN Model 1 Manado, MAN 1 Kotamobagu dan MAN 1 Kota Bitung." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14.1 (2020): 78-95.
- Ngadi, Main, Said Subhan Posangi, dan Herson Anwar. "Perencanaan Pendidikan dalam Studi Alquran dan Hadits." *Jurnal Al Himayah* 4.2 (2020): 338-350.
- Nirmayani, L. Heny. "Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar Melalui Model Pengajaran Bermain Peran." *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar* 1.2 (2020): 207-215.
- Nuryasin, Muhamad, dan Margono Mitrohardjono. "Strategi Perencanaan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam* 4.2 (2019): 77-84.
- Oktapiani, Marliza. "Perencanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Indonesia." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 2.1 (2019): 71-102.
- Primayana, Kadek Hengki. "Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0." *Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya*. Vol. 1. No. 3. 2020.
- Ramdhan, Tri Wahyudi. "Model Pengembangan Kurikulum Multikultural." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5.2 (2019).
- Ridwan, Ahmad. "Implementasi Fungsi Planning di Sekolah dalam Kerangka Manajemen Pendidikan Islam." *Indonesian Journal of Islamic Educational Management* 2.2 (2020): 71-83.
- Ristiana, Lisa. *Model Perencanaan Pendidikan Orang Tua dalam Memilih Lembaga Pendidikan pada Level Madrasah Aliyah (Studi Kasus Desa Tergo Dawe Kudus)*. Diss. IAIN KUDUS, 2020.
- Sahara, Zaini, Muhammad Fuad Zaini, dan Risma Handayani. "Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Mts Al-Wasliyah Stabat." *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 1.2 (2019): 1-8.
- Soekmono, Roostrianawahti, dan Dhita Paranita Ningtyas. "Model Pembelajaran Pendidikan Multikultural melalui Pendekatan Proyek Kolaboratif." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4.2 (2020): 1029-1040.
- Subakat, Rahayu. "Perencanaan Pembelajaran Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter Program Semai Benih Bangsa." *Jurnal As-Salam* 6.1 (2022): 36-48.
- Supriyanto, Agung. "Model Pengembangan Penguatan Pendidikan Karakter dan Literasi Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5.1 (2020): 17-23.

Donna Sampaleng, Baharuddin: Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babelan

Suratno, Joko, Diah Prawitha Sari, dan Asmar Bani. "Kurikulum dan Model-model Pengembangannya." *Jurnal Pendidikan Guru Matematika* 2.1 (2022).

Turmuzy, Muhammad, dkk. "Literature Review: Evaluasi Keterlaksanaan Kurikulum 2013 Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product)." *Jurnal Basicedu* 6.4 (2022): 7220-7232.

Wahyudin, Undang Ruslan. *Manajemen Pendidikan (Teori dan Praktik Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional)*. Deepublish, 2020.

Yusuf, Arif Maulana, dan Budi Permana. "Perencanaan Arsitektur Sistem Terintegrasi Dengan Menggunakan Togaf Adm (Studi Kasus: Yayasan Pendidikan Rosma)." *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi* 14.1 (2019): 21-29.

Yusup, Wirastiani Binti, Bambang Ismanto, dan Wasitohadi Wasitohadi. "Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama." *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* 6.1 (2019): 44-53.